

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

Oleh :

Marlina Puryanti, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani *)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe and analysis the performance of Badan Permasyarakatan Desa (BPD) at Japah village, Japah sub district, Blora district. Based on the results of the study indicate that performance of Badan Permasyarakatan Desa (BPD) has not quite succeeded in Japah vilage, while there are some criteria which is considered very successful, but more will be considered less successful writers. The criteria has not been successful is an effectiveness, input, productivity, and accountability.

The conclusions of this study is the overall performance of Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Japah has not succeeded. Contrainst are owned by limited budgets, limited support of infrastructure and the human resources inadequate. Based on these conclusions, the researchers recommend to Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Japah to improve the criteria assessed to be less successful, so the performance of Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Japah can be optimally achieved.

Keyword: *Performance, Badan Permasyarakatan Desa (BPD)*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Yeremias T. Keban (Keban, 2008 : 210) kinerja organisasi adalah :

kinerja institusi atau yang lebih dikenal dengan kinerja organisasi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga tercapai visi dan misi dari institusi / organisasi tersebut.

Di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa merupakan wilayah otonomi yang berada di bawah, sehingga memiliki kewenangan penuh untuk menentukan prioritas maupun sasaran apa yang akan dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri, juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan otonomi desa tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa atau Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk melaksanakan dan mengatur pemerintahannya serta menitik beratkan pembangunannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari aktor pembangunan nasional juga memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Perda tersebut juga dinyatakan tentang wewenang badan Permusyawaratan Desa. Wewenang tersebut adalah :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
- e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa untuk semakin mengoptimalkan kinerja agar semakin baik. Hal tersebut tentunya untuk menghasilkan ide-ide berkualitas dan demi terwujudnya pembangunan partisipatif yang merata di setiap daerah. Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan memfokuskan pada penulisan penulis mengambil judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora”

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilihat dari kriteria penilaian kinerja organisasi.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

a) Kinerja Organisasi Publik

Kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Surjadi (2009:7) kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Chaizi Nasucha (Sinambela, 2012 : 186) menyatakan bahwa kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha – usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Menurut Yeremias T. Keban dalam bukunya yang berjudul “ Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik” kinerja institusi atau yang lebih dikenal dengan kinerja organisasi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga tercapai visi dan misi dari institusi / organisasi tersebut.

b) Penilaian Kinerja Organisasi Publik

Mempersiapkan dan melaksanakan pengukuran yang dapat memberikan hasil yang optimal memang tidak mudah, mengingat banyak hal yang diperlukan dan dipersiapkan dengan teliti. Menurut Rivai, Basri dalam Sinambela (2012: 3) pengukuran kinerja dititikberatkan pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik – teknik penilaian. Menurut Mohamad Mahsun (Sinambela , 2012 : 191) pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi enam aspek, yaitu :

1. Kelompok masukan (*input*)
Kelompok masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran, seperti: orang, dana, waktu, material, dll.
2. Kelompok proses (*process*)
Kelompok proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok luaran (*output*)
Kelompok luaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*), maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*)
Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*)
Kelompok manfaat adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*)
Kelompok dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Menurut Dwiyanto (2002,48 - 49) ada 5 indikator yang dipakai sebagai kriteria penilaian terhadap kinerja organisasi yang dapat diperoleh dari beberapa sumber dan cara, antara lain:

1. Produktivitas, adalah kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa.

2. Kualitas pelayanan, sumber data utama dari kualitas layanan didapat dari penggunaan jasa atau masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kualitas layanan.
3. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas pelayanan, serta pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas adalah tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas apakah sesuai dengan prinsip-prinsip administratif dan kebijaksanaan suatu organisasi.
5. Akuntabilitas adalah kemampuan suatu organisasi mengimplementasikan kebijaksanaan dan kegiatannya secara konsisten dengan kehendak masyarakat yaitu tidak hanya pada pencapaian target organisasi tetapi juga sasaran yakni masyarakat.

Pendapat lain, yang dikutip oleh Dwiyanto adalah menurut Kumorotomo (Dwiyanto, 2002 : 49). Kumorotomo menggunakan beberapa kriteria untuk menjadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah :

1. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektifitas
Efektifitas pencapaian tujuan organisasi pelayanan publik yang berkaitan dengan rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan
Keadilan, mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Isu mengenai pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab dalam kriteria ini.
4. Daya Tanggap
Berbeda dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi daya tanggap ini.

Berdasarkan uraian tersebut, dan mempertimbangkan kondisi dalam ruang lingkup kerja Badan Permusyawaratan Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora, maka peneliti menentukan 5 (lima) kriteria. Kelima indikator tersebut adalah produktivitas, input, akuntabilitas, efektifitas, dan daya tanggap

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2003:13). Tipe penelitian tersebut, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Kinerja BPD di Desa Japah

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat Desa. Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

a) **Efektifitas**

Efektifitas pencapaian tujuan organisasi publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Rasionalitas menjadi penting, mengingat setiap organisasi harus mengetahui kapasitasnya baik itu kelebihan maupun kekurangannya untuk menyusun target melalui visi, misi, dan tujuan dalam organisasi tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenai nilai yang dijunjung dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dari suatu organisasi. Dalam contoh kasus kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah, efektifitas dapat dilihat melalui kesesuaian visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Japah, serta nilai gotong royong, serta musyawarah mufakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari agen pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sampai saat ini, Badan Permusyawaratan Desa Japah, belum memiliki visi dan misi sendiri. Untuk ketercapaian visi dan misi yang di usung oleh Pemerintah Desa Japah belum dapat berjalan sepenuhnya. Selanjutnya untuk ujian terbentuknya BPD adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Visi dan misi yang ada, merupakan visi dan misi yang dibuat bersama Pemerintah Desa Japah. Minimnya pengertian mengenai pentingnya visi dan misi dalam suatu organisasi membuat para anggota organisasi tidak begitu memusingkan tentang keberadaanya, terlebih lagi bagi organisasi yang berada di tingkat desa. BPD Japah tidak memiliki visi dan misi. Bahkan ada beberapa orang yang justru tidak mengetahui apa visi dan misi dari organisasi mereka sendiri. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Japah yang kurang optimal.

b) **Masukan**

Masukan atau bisa juga disebut input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Masukan dapat berupa sumber daya manusia (SDM), dana, waktu, material, dll. Dalam penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah, peneliti lebih berfokus pada data sumber penentuan usulan kegiatan atau program, serta SDM yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Japah saat ini.

Kelengkapan data – data dan dokumen yang akan digunakan untuk penyusunan rencana kegiatan dan sebagai dasar usulan peraturan desa merupakan komponen

penting dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi, karena keterbatasan jumlah anggota dan ruang penyimpanan, seringkali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya bergantung pada data – data yang dibuat dan diperbaharui oleh Perangkat Desa Jajah. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Jajah adalah mengenai sumber daya manusia (SDM). Badan Permusyawaratan Desa Jajah memiliki keanggotaan yang terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua, satu sekretaris, dan empat anggota lainnya. Untuk latar belakang pendidikan, meski masih belum ada yang memiliki latar belakang sebagai perencana pembangunan, namun sebagian sudah banyak yang merupakan lulusan perguruan tinggi, yaitu 3 orang sarjana/S1 dan satu orang diploma/DIII.

c) Produktivitas

Produktivitas juga dapat dikatakan sebagai rasio antara masukan yang peroleh dan keluaran yang dihasilkan berdasarkan target dan tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Produktivitas dari Badan Permusyawaratan Desa tidak semata hanya mengenai hasil yang dihasilkan tapi juga tentang kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, selain karena tugasnya yang memang untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Jajah juga merupakan jembatan penghubung antara Pemerintah Desa Jajah dengan masyarakat Desa Jajah.

Dari segi kegiatan – kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa Jajah telah menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Kegiatan – kegiatan tersebut mencakup fisik dan non – fisik. Kegiatan non – fisik seringkali berupa penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, pelatihan ketrampilan, dll. Namun, untuk pelatihan ketrampilan sering terkendala dengan kebiasaan penduduk yang selalu saja kembali ke kebiasaan lama yaitu bertani. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan sulitnya mengubah cara pandang masyarakat desa untuk beralih dari pertanian ke industri rumahan menjadikan pelatihan yang diberikan seringkali sia – sia. Kegiatan pembangunan fisik di Desa Jajah lebih kepada peningkatan sarana prasarana di Desa Jajah, seperti pembangunan sarana pertanian, sarana kesehatan, pasar, madin, rehab kantor desa, dll. Untuk pembangunan menurut beberapa informan mereka sepakat mengenai kendala terbesar yang dihadapi adalah tentang pendanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan, sumber pendanaan utama dan terbesar adalah dari APBN, APBD I, dan APBD II. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Jajah berdasarkan kriteria produktivitas belum optimal.

d) Daya Tanggap

Daya tanggap yang dimaksud adalah, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa Jajah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jajah tentu diharapkan memiliki daya tanggap yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan ketepatan Badan Permusyawaratan Desa Jajah dalam menentukan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Jajah.

Penggalian aspirasi dari masyarakat di Desa Japah dimulai dari menghimpun hasil dari musyawarah RT dan dusun. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa Japah secara internal menyatukan pendapat terkait aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musyawarah RT dan dusun. Lalu Badan Permusyawaratan Desa Japah menyeleksi aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam hasil musyawarah RT dan dusun, serta Badan Permusyawaratan Desa Japah secara bersama-sama merumuskan aspirasi yang telah diterima.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan suatu organisasi mengimplementasikan kebijaksanaan dan kegiatannya secara konsisten dengan kehendak masyarakat yaitu tidak hanya pada pencapaian target organisasi tetapi juga sasaran yakni masyarakat. Dalam analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah, peneliti berfokus pada akuntabilitas atau pertanggung jawaban Badan Permusyawaratan Desa Japah kepada masyarakat dan terhadap peraturan perundang – undangan yang mengikatnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Japah memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal satu tahun sekali. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kewajiban tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Dikatakan belum sepenuhnya, karena Badan Permusyawaratan Desa Japah hanya memiliki laporan pertanggungjawaban per kegiatan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban organisasi secara keseluruhan sampai saat ini belum pernah dibuat. Berdasarkan paparan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari kriteria akuntabilitas, kinerja yang ditunjukkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Japah belum optimal.

B. Pembahasan Kinerja BPD di Desa Japah

a) Efektivitas

Teori efektivitas menyebutkan bahwa efektivitas berkaitan dengan rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi sebagai agen pembangunan. Namun sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum memiliki visi dan misi organisasi. Hal tersebut berpengaruh pada ketidakjelasan Badan Permusyawaratan Desa Japah dalam melihat dan menentukan target atau sasaran yang ingin divapai di masa depan. Sehingga akan mempengaruhi kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Japah itu sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah berdasarkan kriteria efektivitas masih belum optimal.

b) Masukan

Masukan atau bisa juga disebut input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Masukan dapat berupa sumber daya manusia (SDM), dana, waktu, material, dll. Potensi yang dimiliki oleh Desa Japah, sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. Terlebih lagi dengan tidak adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki latar belakang sebagai perencana pembangunan,

sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat belum dapat mencakup aspek – aspek penting pengembangan potensi di Desa Japah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah berdasarkan kriteria masukan (input) masih belum optimal.

c) Produktivitas

Dwiyanto menyatakan produktivitas adalah kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Badan Permusyawaratan Desa Japah sebagai organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa Japah. Apabila dilihat dari segi rencana pembangunan, dapat dilihat bahwa tidak semua rencana pembangunan yang dibuat dalam RPJM-Desa Tahun 2011-2015 dapat dilaksanakan tepat waktu. Kendala terbesar yang dihadapi adalah mengenai masalah keterbatasan pendanaan, dalam hal ini sumber pendanaan Desa Japah adalah dari APBN dan APBD. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah berdasarkan kriteria produktivitas belum optimal.

d) Daya Tanggap

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta, organisasi publik seperti Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud daya tanggap negara terhadap kebutuhan vital masyarakat. Terlebih lagi kedudukan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di wilayah desa, menjadikan posisi Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Berdasarkan pembahasan dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa dari kriteria daya tanggap, Badan Permusyawaratan Desa Japah sudah dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan Badan Permusyawaratan Desa Japah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Proses penjaringan aspirasi tersebut dimulai dari tingkat RT/RW , Dusun , yang kemudian dilanjutkan ke tingkat Desa.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan suatu organisasi mengimplementasikan kebijaksanaan dan kegiatannya secara konsisten dengan kehendak masyarakat yaitu tidak hanya pada pencapaian target organisasi tetapi juga sasaran yakni masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa Japah belum membuat laporan pertanggungjawaban secara organisasi, karena laporan pertanggung jawaban yang dibuat hanya per kegiatan, bukan laporan organisasi. Padahal Badan Permusyawaratan Desa Japah, memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan hasil kerja minimal satu kali dalam satu tahun. Kewajiban tersebut tertuang dalam Perda Kabupaten Blora No.5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa dari kriteria akuntabilitas, kinerja yang ditunjukkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Japah belum optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah saat ini masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan karena dari lima kriteria penilaian organisasi, hanya

kriteria daya tanggap yang dapat dikatakan baik, sedangkan 4 kriteria lainnya masih memiliki permasalahannya masing-masing. Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Japah berdasarkan 5 kriteria tersebut adalah :

1. Efektivitas membahas mengenai pencapaian tujuan organisasi, yang berkaitan dengan rasioanalitas, teknis, misi, tujuan organisasi. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Japah dikatakan belum optimal, karena Badan Permusyawaratan Desa masih belum memiliki visi dan misi. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tujuan dan target organisasi yang ingin dicapai oleh Badan Permusyawaratan Desa Japah, sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal.
2. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka mencapai tujuan, misalnya dokumen – dokumen administratif, SDM, dana, dll. Kriteria masukan dari Badan Permusyawaratan Desa Japah juga belum optimal. Hingga saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum memiliki SDM yang kompeten dalam bidang perencanaan pembangunan ditamba lagi keterbatasan sumber pendanaan kegiatan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan belum optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah.
3. Produktivitas adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai target dan tujuan organisasi. Masih banyaknya rencana kegiatan dalam RPJM-Des yang belum terlaksana, karena minimnya pendanaan dari pemerintah menjadi kendala utama rendahnya tingkat produktivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah. Kendala lain yang dihadapi adalah mengenai pelatihan yang seringkali menjadi sia – sia karena tidak ada tindak lanjut baik dari pemerintah maupun masyarakat Desa Japah itu sendiri. hal tersebut menunjukkan belum optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa Japah.
4. Daya tanggap yang dimaksud merupakan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk menanggapi kebutuhan masyarakat. Daya tanggap Badan Permusyawaratan Desa Japah dapat dikatakan optimal, karena sudah mampu menjangkau aspirasi masyarakat dan menyampaikannya sesuai kebutuhan masyarakat Desa Japah
5. Akuntabilitas adalah kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijaksanaan dan kegiatan secara konsisten atau biasanya lebih ditunjukkan dengan kewajiban pertanggungjawaban suatu organisasi. Berdasarkan kriteria akuntabilitas Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum dilaksanakan kewajiban untuk melakukan pelaporan hasil kinerja sesuai Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hal yang di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yaitu:

1. Berdasarkan kriteria efektivitas, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa Japah dapat memiliki visi dan misi organisasi sendiri. Dengan adanya visi dan misi organisasi sendiri, anggota Badan Permusyawaratan Desa Japah akan lebih mampu menentukan dan melihat target yang ingin dicapai.

2. Berdasarkan kriteria input (masukan), Badan Permusyawaratan Desa Japah dapat menggunakan jasa tenaga ahli di bidang perencanaan pembangunan.
3. Berdasarkan kriteria produktivitas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora dapat lebih memperhatikan perkembangan dan kondisi pembangunan di Desa Japah, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
4. Berdasarkan kriteria akuntabilitas, diharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Japah diharapkan dapat membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar memudahkan saat proses evaluasi kinerja organisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus,dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Galang Printika Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan permusyawaratan Daerah.